


IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PERDESAAN DI DESA KEBON AGUNG, KECAMATAN IMOIRI, KABUPATEN BANTUL

Oleh :
Husin Bahri¹⁾

 *In broad sense, planning can be considered as activity process that is comprehensive and continuous from planning, execution, control and evaluation. As a process, planning is a continuity that includes two aspects, namely planning formulation and its implementation. Success or achievement of planning is finally determined by how far the current planning can be implemented.*

Rural tourism development planning is in the form of Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW) in Kebon Agung Village. It is a part of local development planning process in tourism development of Bantul Regency. Viability of the planning in its implementation needs considerable study in order to find out how far the rural tourism development is able to accommodate and optimize natural and cultural resources in one side so that it can give benefit to society, tourists, and local government, and it can be critical foundation to improve tourism development for better future in other side.

The objectives of this research are: first, to describe and analyze the implementation of rural tourism development planning in Kebon Agung Village, and second, to describe and analyze any supporting and impeding factors that have role in the implementation of rural tourism development in Kebon Agung Village.

The research is descriptive by using qualitative approach, that is a kind of research that uncovers real problem in accordance to the facts found in the field. Research data were gained from interview with competent people and document gathering having correlation to the research.

Finding of the research indicates that principally, rural tourism development in Kebon Agung County in the form of RTOW is correspond to the concept of macro and regional tourism development planning that underlines tourism development public based through exploration of tourist village. Implementation based on the direction of support capability development of tourist area in zone aspects of area, environment, tourist product, human resource and institution has satisfied and run well. While implementation of tourism support capability in tourist facility is still limited in its development, hence it makes implementation of rural tourism development planning in Kebon Agung County totally has not run optimally. Supporting factors in this implementation are: planner institution, public respond, human resource availability and cooperation with any parties concerned. While impeding factors are: unsupported fund availability, time and space that have optimistic pattern, policy legalization that is not consistent and the lack of decision maker commitment.

1. Husin Bahri adalah Kasubbag Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi secara nyata memberi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur rumah tangganya termasuk di dalamnya memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna mengisi pembangunan pada daerah tersebut.

Konsekuensi dari kerangka otonomi daerah tersebut selanjutnya adalah Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk tujuan perubahan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Perencanaan pembangunan daerah meliputi seluruh sektor pembangunan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah, termasuk salah satunya adalah kewenangan di bidang pariwisata. Otonomi memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata daerah. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana dan cepat. Di samping itu, peluang untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata menjadi lebih terbuka. Selain itu amanah otonomi juga menuntut peran aktif dan proaktif daerah untuk

menangkap berbagai peluang pasar pariwisata di daerahnya, dan secara profesional menentukan perencanaan pariwisata untuk daerahnya masing-masing.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Bantul baik sebagai akselerasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat juga sebagai penyumbang PAD. Kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dalam 5 tahun terakhir ke Kabupaten Bantul serta perubahan *trend* pariwisata yang saat ini telah berkembang lebih dari sekedar melakukan perjalanan ke suatu tempat atau lokasi, namun berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan adanya kecenderungan pada kegiatan yang berkaitan dengan alam serta kepedulian terhadap lingkungan yang ditandai dengan semakin banyaknya wisatawan yang tertarik mengunjungi daerah-daerah terpencil dan khusus, yang jarang dijamah wisatawan massal seperti arung jeram, safari, desa wisata, hingga tinggal di pondokan desa terpencil (disebut sebagai wisata minat khusus atau *alternative tourism* sebagai kebalikan dari wisata massal), membuat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengkaji kembali kebijakan pengembangan pariwisata dengan melakukan langkah-langkah antisipatif yang salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata perdesaan (desa wisata) sebagai daerah tujuan wisata alternatif baru dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian ilmiah perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung dalam

bentuk Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW) Desa Kebon Agung. Desa ini dipilih karena memiliki sumber daya untuk dapat dikembangkan menjadi desa wisata sebagai salah satu alternatif destinasi wisata di tengah kejenuhan pasar wisata alam di Kabupaten Bantul. Kegiatan pariwisata yang dapat diandalkan di Desa Kebon Agung adalah keanekaragaman obyek wisata, kerajinan, budaya, dan tradisi serta pendidikan. Di samping itu di tepian desa tersebut juga terdapat sebuah bendung yakni Bendung Tegal yang dapat menjadi obyek wisata air dan sarana olahraga air seperti renang dan dayung.

Sejalan dengan perubahan *trend* pariwisata yang terus berubah menuju wisata alternatif di masa datang serta prioritas kebijakan kepariwisataan nasional saat ini yaitu optimalisasi program pengembangan pariwisata perdesaan melalui pembentukan dan pengembangan desa wisata dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, seharusnya upaya pengembangan pariwisata perdesaan melalui pengembangan desa wisata menjadi peluang dan aspek penting guna meningkatkan pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Bantul, khususnya di Desa Kebon Agung. Dalam konteks ini faktor penting yang perlu diketahui adalah sejauhmana implementasi di lapangan dari formulasi rencana yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penelitian ini melakukan analisis terhadap pengembangan pariwisata perdesaan di Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Kebon Agung,

Kecamatan Imogiri, sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di Kabupaten Bantul melalui kajian yang dikhususkan pada aspek implementasi perencanaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung?
- 2) Faktor-faktor apakah yang berperan sebagai pendukung dan penghambat dalam implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan atau menjawab dari rumusan masalah tersebut, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis:

- 1) Implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung.
- 2) Faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung dan penghambat dalam Implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan selain dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian ilmiah tentang perencanaan pembangunan daerah bidang kepariwisataan, khususnya upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan, juga sebagai sumbangan pemikiran bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menentukan formulasi perencanaan pembangunan daerah bidang pariwisata, khususnya pengembangan pariwisata

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rebecca Torres (2003), *Linkages Between Tourism and Agriculture in Mexico* (Keterkaitan antara Pariwisata dan Pertanian di Meksiko) bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pengembangan pariwisata dengan menganalisa kebutuhan pariwisata yang dikombinasikan dengan analisa terhadap sumber pertanian lokal, dan diharapkan untuk suatu hubungan dalam menyediakan produk-produk pertanian bagi kebutuhan pariwisata. Hasil penelitiannya bahwa perencanaan pengembangan pariwisata telah gagal menstimulasi pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu: penawaran hasil/produk pertanian kepada pariwisata kurang beragam, permintaan hasil/produk pertanian untuk kebutuhan pariwisata yang tidak seimbang, dan lemahnya jaringan pemasaran pariwisata.

Kusworo dan Damanik (2004), dalam penelitian berjudul *Friend of Community Hotel: Menuju Kemitraan yang Melembaga dalam Pengembangan Pariwisata*, hasil penelitian yang dilakukan di Yogyakarta tersebut menunjukkan adanya gagasan dari usaha pariwisata, yaitu hotel dan biro perjalanan wisata (*tour & travel*) untuk mengembangkan model peningkatan

daya tarik wisata dengan cara membangun kerjasama dengan masyarakat yang berada di daerah tujuan wisata atau yang mempunyai potensi oyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan implementasi model penelitian yang diujicobakan tersebut dipandang mampu menawarkan alternatif bagi industri pariwisata untuk mewujudkan kegiatan yang lebih progresif, memberdayakan, melembaga, dan saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal.

Kayat (2006), dalam penelitian berjudul *Stakeholders Perspectives Toward a Community-Based Rural Tourism Development*, menginvestigasi tingkat atau derajat kepentingan dan perhatian terhadap implementasi program pengembangan Kampung Pelegong Homestay (KPH), sebuah tempat wisata pedesaan (Desa Wisata) di Malaysia, yang dikaitkan dengan stakeholder, perubahan social, dan teori-teori kekuatan. Dengan menggunakan sebuah pendekatan studi kasus, studi ini menguji pandangan dan pemikiran dari *stakeholder* dalam program pengembangan KPH dan mengeksplorasi arah dari konsepsi mereka, gagasan perubahan social, dan teori kekuatan untuk menghasilkan pemahaman yang jelas dari sebuah kasus spesifik berdasarkan analisis *stakeholder*, dalam arti mengeksplorasi pandangan-pandangan secara respektif *stakeholder* pada pengembangan wisata pedesaan di Malaysia. Studi ini menemukan bahwa kepentingan *stakeholder* (Pegawai Pemerintah Pusat dan Lokal, Masyarakat KPH, Anggota Komite Program KPH, Tamu KPH, Organisasi yang membawa Tamu ke

KPH selain *Travel Agent* dan *Tour Operator*) dalam implementasi pengembangan *homestay* dapat dijelaskan oleh setiap atau oleh kombinasi dari tiga komponen: kekuatan mereka, atau kelemahan dari kekuatan, untuk mempengaruhi program (berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk program, ketergantungan atas program (seberapa penting program tersebut bagi mereka), dan pertaruhan (apa yang dimiliki atas pengembangan tersebut). *Stakeholder* akan memiliki kepentingan pada program pengembangan ketika mereka dipengaruhi program (pertaruhan mereka dalam pengembangan tinggi) atau ketika mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi program (pertaruhan mereka dalam pengembangan rendah tetapi kekuatan mereka dalam hubungan tinggi).

Puy (2007), melalui penelitian berjudul *Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Base G*, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pengembangan obyek wisata Pantai Base G oleh Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan perencanaan pengembangan OW Pantai Base G memiliki tantangan antara lain meliputi: efisiensi pengelolaan SDA, peningkatan pemberdayaan kinerja aparatur, pengembangan kelembagaan, dan diversifikasi pada pemasaran. Sedangkan terkait dengan penerapan kebijakan daerah meliputi antara lain: pengembangan kualitas SDM dan peningkatan pelayanan umum investasi pemerintahan.

Gillian Wallace (2008), melalui penelitian berjudul ***Eco-Cultural Tourism As A Means For The Sustainable Development Of Culturally Marginal And Environmentally Sensitive Regions***, menunjukkan bahwa implementasi *eco-cultural tourism* memberikan kontribusi dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan dengan perilaku yang bersahabat. Serta mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui gagasan umpan balik pada sistem edukasi. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa keberlanjutan harus dipisahkan dari keuntungan. NGO dan Pemerintah Lokal diharapkan untuk mengembangkan *eco-cultural tourism* dalam jangka pendek. Nilai yang diharapkan muncul adalah pemberdayaan dan edukasi masyarakat lokal dan dalam jangka panjang tercipta pengembangan berkelanjutan.

Lesego S. Sebele (2009), *Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khana Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana* (Model pariwisata berbasis masyarakat, manfaat dan tantangannya di Kebun Binatang Khana Rhino di Central Distric Botswana, South Africa), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya mengimplementasikan program pengembangan pariwisata, tetapi pada kenyataannya sangat jarang masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, kebijakan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM) memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal, lebih banyak

adanya interaksi antara masyarakat lokal dan pengelola program CBNRM, keberhasilan serta keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Terminologi dan konsep kebijakan publik dalam berbagai kepustakaan dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Menurut Friederick (dalam Islamy, 2007: 17), mendefinisikan konsep kebijakan publik sebagai "*public policy is proposed course of action of a person, group, or government within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*". (Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan, terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Sedangkan Dye (dalam Wahab, 2005:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*Whatever government choices to do or to do*" (apa pun yang dipilih oleh pemerintah melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu). Pemerintah melakukan sesuatu merupakan suatu kebijakan karena tindakan pemerintah berdampak luas kepada masyarakat, sebaliknya pemerintah tidak melakukan juga merupakan suatu kebijakan, karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak yang sama besarnya dengan pemerintah melakukan sesuatu.

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk kepentingan publik dan dirumuskan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap kebijakan mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan pengawasan dalam pemerintahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahannya.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2005: 9), pada dasarnya kebijakan Negara (publik) mengandung resiko untuk gagal. Pengertian kegagalan dikategorikan 2 (dua) hal yakni:

- 1) *Non implementation* (tidak terimplementasikan), mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tidak ada kerjasama, tidak menguasai permasalahan ataupun wilayah permasalahan yang diluar jangkauan kewenangan. Adapun alasan tidak terimplementasikannya sebuah kebijakan seperti:

- a. Kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana
 - b. Mungkin pihak-pihak yang terlibat, dalam implementasi kebijakan tidak mau bekerjasama (*uncooperative*)
 - c. Bekerjanya tidak efisien (*inefficient*)
 - d. Tidak menguasai permasalahan dan di luar jangkauan kekuasaan
 - e. Hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi.
- 2) *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak sukses), kebanyakan disebabkan oleh faktor eksternal yang ternyata tidak menguntungkan. Adapun alasan tidak berhasilnya implementasi kebijakan dikarenakan:
- a. Kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan
 - b. Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: pelaksanaannya jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*). Suatu kegagalan implementasi dapat pula dikarenakan ditolak atau tidak diterima oleh kelompok sasaran. Adapun alasan penolakan ini dapat disebabkan:

- 1) Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut;
- 2) Kelompok sasaran tidak memahami manfaat kebijakan tersebut, sehingga kelompok sasaran merasa tidak membutuhkannya. Kelompok sasaran tidak menyukai pelaksana kebijakan.

2.3. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan Negara setelah memperoleh legitimasi, perlu diimplementasikan agar mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Van Meter dan Van Horn dalam Soeprapto (2005: 113), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievements of goals and objectives set forth in prior policy decisions*".

Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai tujuan perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Oleh karena itu maka menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.

Oleh sebab itu tidak selalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Dalam kamus Webster (lihat Wahab, 2005: 64), diejelaskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give*

practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Bila pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan publik (biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, atau perintah Eksekutif). Hal lain seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2005:65), makna implementasi sebagai berikut :

“memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta (individu ataupun kelompok). Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab (2005: 68) bahwa dalam implementasi khususnya yang melibatkan banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni: (1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat); (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); (3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan

pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran (*target group*).

Selanjutnya model implementasi kebijakan digunakan untuk memodelkan implementasi kebijakan, yang menjelaskan proses kebijakan yang terdapat pada tahap implementasi. Dalam khasanah ilmu kebijakan publik atau analisis kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan kebijakan yang ingin diteliti dan tujuan analisis itu sendiri. Model dapat membantu untuk memahami tentang kebijakan publik dan dapat mengidentifikasikan aspek-aspek signifikan yang sebenarnya dari kebijakan publik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2005: 48), mengatakan bahwa model sebagai “*a representation of something else, designed for a specific purpose*” (artinya: model sebagai suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu).

Menurut Nugroho (2004: 165), pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom-top*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic intensif*).

Berdasarkan model tersebut, peran penting dari analisis kebijakan

adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Dalam proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana, lebih dari itu menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (*intended impact*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effect*).

Sedangkan fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan negara sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Nugroho, 2004: 158). Kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena implementasi kebijakan tidak bersangkutan dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Birokrasi publik

diharapkan perlu memperhatikan aspek-aspek beragam dimensi yang dicakup dalam kebijakan publik sekaligus mampu pula merefleksikan nilai-nilai sosial, politik, dan keakraban psikologi dan kultural. Dengan demikian dalam kasus ini birokrasi eksistensinya bukanlah hanya berperan sekedar pelaksana (*simple implementation*) yang dalam kesehariannya hanya menangani pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sepele dan bersifat rutin.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat 2 (dua) pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan yaitu mulai dari kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah atau peraturan pelaksanaan, kemudian program, dan ke kegiatan.

2.3.4 Faktor Penghambat dan Pendukung dari Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Namun dalam prakteknya, tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsire dalam Wahab (2005: 61) disebut sebagai *implementation gap*, sebagai keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Besar kecilnya perbedaan tersebut

tergantung *implementation capacity*, yang menurut Williams dalam Wahab (2005:61), sebagai kemampuan organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat tercapai.

Dalam kaitan ini Hogwood dan Gunn (1986:61-62) seperti yang dikutip oleh Soeprpto (2005: 119) menyatakan bahwa:

"Kegagalan kebijakan (*policy failure*) dari sisi *internal factors* adalah tidak terimplementasikan kebijakan sesuai dengan rencana (*non implementation*) karena: (a). tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat; (b). pihak terlibat bekerja tidak efisien; (c). pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahannya; (d). permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya".

Sedangkan Soenarko (2002: 185), mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain karena :

1. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulating* terhadap kebijakan tersebut;
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif;
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Isi dari kebijakan tersebut bersifat samar-samar;
5. Ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern;

6. Kebijakan yang telah ditetapkan itu mengandung banyak lubang;
7. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, ruang, dan sumberdaya manusia).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, sejak dalam pembuatan kebijakan itu bukan hanya disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan pula disebabkan pembuatan kebijakan yang kurang sempurna. Di sinilah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulating* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan masalah di atas, Gow dan Moss (dalam Keban, 2004: 73), mengungkapkan hambatan dalam implementasi kebijakan antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan sumber daya manusia dibidang teknis dan adminis-trasi; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi; (6) pengaturan waktu (*timing*); (7) sistem informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antar aktor. Oleh sebab itu menurut Weimer dan Vining (1999: 398), bahwa ada tiga aktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan meliputi: (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan

atau seberapa jauh hubungan logis antar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran-sasaran yang ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen, untuk mengelola pelaksanaannya.

Selanjutnya Grindle (dalam Wahab, 2005:127), menyebutkan proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dimulai apabila : (1) tujuan-tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; (2) program-program aksi telah dirancang dan; (3) sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut.

Pada prinsipnya, implementasi adalah merupakan suatu kecakapan atau kemampuan untuk mewujudkan hubungan sebab akibat sehingga kebijakan dapat memberikan hasil. Implementasi menjadi semakin tidak efektif bila hubungan yang ada terjadi "defisit". Oleh karena itulah maka kebijakan yang kurang sempurna itu perlu dikaji dan dianalisis dengan jelas untuk dicarikan cara pemecahannya. Pemecahan tersebut menurut Islamy (2003: 31), harus dilakukan sebagai berikut: (1) tujuan kebijakan harus di definisikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak; (2) sumber-sumber yang diperlukan harus tersedia dengan cukup; (3) rantai komando harus dapat berjalan secara efektif; (5) pengawasan yang ketat harus dilakukan terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat dan dana untuk menunjang kegiatan tersebut telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan disebut perencanaan kebijakan yang merupakan formulasi kebijakan atau tahapan dalam pembuatan kebijakan.

2.4. Perencanaan Pembangunan

Dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi perlu dibuat perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan, sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan.

Menurut Siagian (1994:108) "perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan."

Adapun alasan-alasan perlunya suatu perencanaan itu dilakukan menurut Tjokroamidjojo (1995:8), didasarkan pada tiga hal, yaitu pada:

- a) Penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efisien dan efektif;

- b) Keperluan mendobrak ke arah perubahan struktural ekonomi dan sosial masyarakat;
- c) Yang terpenting adalah arah perkembangan untuk kepentingan keadilan sosial.

Dari penyampaian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa perencanaan itu sendiri mempunyai kegunaan yaitu untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal agar memberikan hasil yang maksimal ke arah perubahan struktur ekonomi dan sosial serta mengurangi adanya kesenjangan di antara masyarakat suatu negara atau daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar (*action plan*) bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai: "Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik".

Dari defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu perencanaan yang dilakukan untuk tujuan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap suatu daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Sementara itu Soekartawi (1990: 24), aspek perencanaan yang dikaitkan dengan pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) topik utama, yaitu :

- a. Perencanaan sebagai "alat" dari pembangunan; dan
- b. Perencanaan sebagai tolok ukur dari berhasil-tidaknya pembangunan tersebut.

Dari uraian tentang perencanaan pembangunan di atas, apabila dihubungkan dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan maka dapat diperoleh definisi perencanaan pembangunan daerah seperti yang ditulis Riyadi dan Bratakusumah (2004: 7) sebagai berikut: "Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas".

Dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:11-15) aspek-aspek tersebut, antara lain:

(a) Aspek Lingkungan

Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam populasi di mana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar populasi, tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik.

(b) Aspek Potensi dan Masalah

Aspek ini merupakan fakta di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan.

(c) Aspek Institusi Perencana

Aspek institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah karena pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat.

(d) Aspek Ruang dan Waktu

Aspek jangka waktu yang dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan aspek ruang perencanaan pembangunan daerah dikenal dengan istilah *spatial planning*, yakni suatu perencanaan yang diarahkan bagi penataan ruang suatu wilayah agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhan, serta daya dukungnya.

(e) Aspek Legalisasi Kebijakan

Ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan yang dapat mengakibatkan implikasi hukum terhadap para pelanggarnya.

Proses pembangunan daerah dapat dilihat dengan tiga cara pandang yang berbeda, yaitu: **yang pertama**, pembangunan bagi suatu kota, daerah atau wilayah sebagai suatu wujud (*entity*) bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan kota, daerah, atau wilayah lain, sehingga penekanan perencanaan pembangunannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri (*independent*). **Yang kedua**, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dalam pendekatan ini merupakan perencanaan pembangunan pada suatu *jurisdiksi* ruang atau wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai bagian dari pola perencanaan pembangunan nasional. **Yang ketiga**, perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah (Kartasasmita, 1997:37-38).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan yang memberikan dampak

terhadap kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui kegiatan proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik dalam suatu daerah.

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Dikaitkan dengan pembangunan, maka proses perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari pengumpulan informasi untuk perencanaan yang akan dianalisis, perumusan kebijaksanaan hingga kegiatan peramalan (*forecasting*) (Wrihatnolo dan Riant, 2006: 41-42).

Proses perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. Banyak kesalahan pendapat terjadi, bahwa dengan adanya suatu rencana pembangunan, akan dengan sendirinya terselenggara suatu proses perencanaan (pembangunan). Waterstan (1965) dalam Tjokroamidjojo (1995: 188) menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses berbeda dengan suatu dokumen rencana pembangunan.

Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kemudian diikuti dengan berbagai langkah-

langkah kegiatan (*measures*) untuk merealisasikannya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana tersebut bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasinya, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.

2.5 Perencanaan Pengembangan Pariwisata

2.5.1 Defenisi Pengembangan Pariwisata

Kata pengembangan yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan mengembangkan" (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 414). Sedangkan menurut S. Pamuji (1985: 7), pengembangan adalah: "sebagai suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat".

Dari definisi pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan dan memperbaiki secara teratur dan bertahap, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dengan demikian pariwisata meliputi:

- (a) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata;
- (b) pengusaha obyek dan daya tarik seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, dan tata kehidupan masyarakat, atau yang bersifat alamiah seperti: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai;
- (c) pengusaha jasa dan sarana pariwisata, yaitu usaha jasa pariwisata yang terdiri dari biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata, serta usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, dan angkutan wisata.

Sementara itu Pitana dan Gayatri (2005:91) berpendapat bahwa pengertian dari pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi kunjungan tersebut semata-mata untuk menikmati perjalanan guna memenuhi keinginan yang beraneka ragam, antara lain: ingin melihat keindahan alam suatu daerah, mengetahui sejarah, dan mengetahui seni serta budaya daerah tujuan.

Dengan demikian pengertian pengembangan pariwisata adalah pembangunan yang dilakukan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pariwisata di satu daerah atau lebih dengan sasaran pada masyarakat yang berdomisili di satu daerah atau lebih.

2.5.2 Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Hal ini didasari oleh fakta bahwa selain berfungsi sebagai katalisator pembangunan, pariwisata juga merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosis dalam berbagai aspeknya. Pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata tidak lain ialah agar perkembangan pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup (Yoeti, 2008: 47).

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah secara keselu-

ruhan maka keberhasilan perencanaan pembangunan bidang pariwisata juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah yang menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004: 15) adalah: faktor lingkungan, sumber daya manusia perencana, sistem yang digunakan, perkembangan ilmu dan teknologi, dan faktor pendanaan.

Faktor lingkungan di sini dapat diinterpretasikan sebagai berikut : a) apakah lingkungan (obyek wisata) tersebut layak dikembangkan? dan b) apakah pengembangan obyek wisata tersebut tidak merusak lingkungan di sekitarnya tetapi sebaliknya dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar obyek wisata yang dikembangkan.

Faktor sumber daya perencana memegang peran yang sangat penting. Sebab perencana yang menguasai bidang pekerjaannya akan dapat membuat perencanaan yang komprehensif sehingga pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dan memberi manfaat yang optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata adalah faktor pendanaan. Dengan pendanaan yang memadai akan dapat dilakukan proses perencanaan pariwisata yang optimal sehingga manfaat dari perencanaan tersebut juga optimal. Selanjutnya dengan anggaran yang memadai akan dapat dilakukan pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan obyek wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan.

Secara lebih detail Reid dan Smith (1997: 69) menyatakan bahwa dalam konteks keberhasilan perencanaan dan pengembangan pariwisata terdapat 3 (tiga) elemen fundamental yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) *Lokal resident*, masyarakat lokal yang merupakan bagian dari pengalaman wisata. Budaya mereka memberikan cita rasa terhadap tempat wisata tersebut, namun di sisi lain mereka juga membutuhkan privasi. Melibatkan mereka merupakan hal mutlak sebelum pengembangan dilakukan.
- 2) *Visitors*, wisatawan sebagai sasaran dari keberadaan tempat wisata. Keberhasilan aspek wisatawan lebih ditekankan pada kualitas daripada kuantitas. Kualitas wisatawan dilihat dari kunjungan berulang yang dilakukan dan menghargai lingkungan baik alam maupun buatan manusia
- 3) *Visitor domain*, merupakan area di mana atraksi dan pelayanan dikelompokkan dan disatukan sehingga pengalaman wisatawan akan lebih dapat ditingkatkan. Secara umum elemen ini merupakan rangkaian dari atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dari tempat atau destinasi wisata.

Lebih lanjut mengenai perencanaan pengembangan pariwisata, Hadinoto (1996: 76) menyatakan bahwa proses perencanaan pengembangan pariwisata dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:

- 1) Rencana Konseptual, yang merupakan konsepsi garis besar dan menentukan sasaran, strategi pengembangan dan maksud/tujuan pengembangan. Di dalamnya

tergambar tentang kawasan pariwisata atau destinasi yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi wisata yang diidentifikasi oleh studi Pasar Wisata;

- 2) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, yang lebih detail dan lebih teknik pembangunan. Di dalamnya terdapat penentuan lahan pariwisata dan penentuan tata guna lahannya, juga perencanaan rincian prasarana yang akan dibutuhkan serta peraturan-peraturan mengenai standar, pola bangunan, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang paling utama adalah menyusun kerangka kesempatan berkembangnya pariwisata, yang merupakan strategi pengembangan komprehensif Daerah Tujuan Wisata (di Kabupaten), yaitu mengenai penentuan wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata andalan bagi daerah tersebut, agar pengembangan di masa yang akan datang dapat terkoordinasi dan terarah ke kawasan-kawasan yang memang layak diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.

Dalam uraian tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa pembangunan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan perencanaan yang komprehensif terkait dengan penentuan destinasi wisata dan upaya-upaya peningkatan kapasitas terhadap semua komponen maupun pelaku pariwisata yang terlibat seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, promosi, lingkungan, sarana dan pasarana,

sehingga keberhasilan yang akan dicapai dapat memuaskan dan dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

2.6. Pengembangan Pariwisata Perdesaan

Sektor pariwisata diyakini dapat meningkatkan pengentasan kemiskinan. Namun pertanyaan lebih lanjut adalah pengembangan pariwisata yang bagaimana yang dapat menguntungkan rakyat?. Pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu upaya di sektor pariwisata yang diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat khususnya di pedesaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yoeti (2008: 231), yang mengatakan bahwa dalam rangka membangun ekonomi pedesaan berdasarkan kerakyatan, membangun desa menjadi Desa Wisata merupakan suatu cara dalam usaha pengentasan kemiskinan. Dengan membangun dan mengembangkan Desa Wisata, sekaligus akan dapat memberdayakan pembangunan masyarakat dalam bentuk:

- 1) Mengembangkan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan orang banyak pada umumnya dan wisatawan yang datang berkunjung ke desa tersebut.
- 2) Mengembangkan usaha kerajinan tangan (*handicraft*), cenderamata (*souvenir goods*), barang-barang kesenian (*arts*), lukisan (*paintings*), dan barang-barang yang dapat dijadikan oleh-oleh bila berkunjung ke desa tersebut.
- 3) Mengembangkan agrowisata untuk tanaman-tanaman yang tumbuh secara tradisional di desa tersebut.

- 4) Mengembangkan ekowisata (*eco-tourism*) untuk menarik *ecotourists* dan para pecinta alam yang di waktu yang akan datang diperkirakan lebih banyak berkunjung.
- 5) Mengembangkan dan menjadikan rumah-rumah rakyat menjadi *Home Stay* yang layak menampung wisatawan yang menginap di desa tersebut.
- 6) Menghidupkan dan memelihara seni budaya tradisional, cerita-cerita rakyat serta kebiasaan hidup masyarakat (*the way of life*) untuk dijadikan sebagai atraksi wisata di malam hari.

2.6.1 Pengertian Pariwisata Perdesaan

Bila ditelusuri pemahaman menyangkut pariwisata perdesaan cukup beragam. Menurut (Yoeti, 2008: 94), pariwisata perdesaan merupakan serangkaian aktivitas pariwisata yang mengambil lokasi di desa, sehingga pariwisata perdesaan ini identik dengan istilah Desa Wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk lingkungan permukiman yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal, dan menghayati/mempelajari kekhasan desa beserta segala daya tariknya. Sesuai pula dengan tuntutan kegiatan hidup masyarakatnya (mencakup kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya), sehingga terwujud suatu lingkungan yang harmonis, rekreatif, dan terpadu dengan lingkungannya (Ikaputra, 1985: 34)

Desa wisata merupakan bentuk desa yang memiliki ciri khusus di dalamnya, baik alam dan budaya, serta

berpeluang dijadikan komoditi bagi wisatawan. Wujud desa wisata itu sendiri bahwa desa sebagai objek dan subyek pariwisata. Sebagai objek, merupakan tujuan kegiatan pariwisata, sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung, dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan desa wisata itu sendiri (Soebagyo, 1991: 10).

Pendapat lain mengatakan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3)

Dalam kegiatannya, seringkali wisatawan tinggal di dalam atau dekat dengan suasana tradisional dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep, 1991: 172). Dalam hal ini, ada proses belajar (*learning*) dari masyarakat (*hosts*) kepada wisatawan (*guests*), sehingga para tamu mampu memberikan penghargaan (*rewarding*) kepada nilai-nilai lokal yang masih dianut oleh komunitas setempat.

Sebagai suatu bentuk struktur dari kegiatan pariwisata, desa wisata erat kaitannya dengan kegiatan tinggal, menetap di dalam atau dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan, belajar mengenai desa dan budaya lokal serta cara hidup masyarakat serta

seringkali turut berpartisipasi dalam aktivitas pedesaan. Dalam perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan desa wisata masyarakat terlibat secara penuh sehingga dengan demikian diharapkan keuntungan dapat diterima oleh penduduk itu sendiri.

Menurut pola, proses, dan tipe pengelolanya, desa atau kampung wisata di Indonesia sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a. Tipe Terstruktur (*enclave*)

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut:

- 1) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional.
- 2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.
- 3) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk "menangkap" servis-servis dari hotel-hotel berbintang lima.

b. Tipe Terbuka (*spontaneus*)

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya

kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata yaitu:

- 1) *Akomodasi*: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- 2) *Atraksi*: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa, dan lain-lain yang spesifik.

2.6.2 Pengembangan Produk Desa Wisata

Produk pariwisata pedesaan mencakup tiga aspek yang dikenal dengan istilah Triple A (*Atraksi*, *Amenitas*, dan *Aksesibilitas*). Produk pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat "dijual" sebagai komoditas pariwisata. *Atraksi* adalah objek/daya tarik wisata, yakni objek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dan dinikmati, yang layak "dijual" ke pasar wisata.

Secara sederhana produk desa wisata adalah segala macam objek bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tarik wisata dan layak

ditawarkan, "dijual" kepada wisatawan, baik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Objek pariwisata pedesaan beserta segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama bagi seseorang untuk berkunjung ke suatu tempat. Untuk itu keaslian dari objek dan atraksi yang disuguhkan tetap harus dipertahankan. Di samping keaslian yang tetap dipertahankan juga perlu dipikirkan variasi objek dan atraksi yang hendak dijual. Di sinilah pentingnya pengembangan produk di bidang pariwisata. Logikanya, keberhasilan pengembangan produk yang dilakukan akan berakibat meningkatnya kunjungan wisatawan yang berimbas pada lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan.

Atraksi wisata pedesaan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni atraksi yang dapat dinikmati atau dicerap panca indra (*tangible/material*) dan atraksi yang tidak dapat dilihat secara kasat mata (*immaterial/intangible*). Dua bentuk ini sebetulnya dapat dikemas secara bersama ataupun berbeda. Contoh atraksi wisata yang dapat dilihat secara konkrit adalah pertunjukan tari, menikmati masakan lokal, melihat bangunan-bangunan khas desa (*arsitektur*), mengikuti kegiatan bertani di sawah atau mengambil salak di kebun, memetik daun teh dan memprosesnya menjadi teh siap saji yang dapat dilakukan secara mandiri. Serta beberapa contoh atraksi material lainnya yang dapat dilakukan para tamu secara sukarela.

Sedangkan untuk atraksi yang *intangible*, atau atraksi yang tidak dapat dicerap panca indera antara lain adalah menyimak penuturan seorang sesepuh

desa yang menceritakan masa lalu sebuah desa, atau mendengarkan cerita (mitologi) dari keberadaan/asal-muasal yang berkembang di wilayah tertentu. Melalui kegiatan mendengar serta melakukan proses membayangkan (*berimajinasi*) maka tamu akan mendapatkan sesuatu yang dapat mengisi kekosongan atas sebuah informasi tertentu yang dapat diperolehnya selama melakukan kegiatan wisata di desa.

Di samping atraksi, yang termasuk dalam produk wisata lainnya adalah amenities, yakni segala macam fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata. Dalam kaitannya dengan kegiatan wisata pedesaan sarana amenities yang diperlukan wisatawan tidak perlu seperti yang terdapat di perkotaan. Bukan sebuah hotel berbintang yang dicari, namun justru kesederhanaan seperti hakekat kegiatan wisata pedesaan yakni mengajak tamu untuk *live in* (tinggal bersama) di sebuah rumah tangga pedesaan. Dengan tinggal bersama, maka para tamu dapat melihat dan mengikuti serta melakukan segenap kegiatan seperti halnya empunya rumah sesuai keinginan para tamu yang tentu saja mengikuti sopan santun. Meski demikian beberapa bangunan seperti halnya akomodasi/*home stay* untuk tempat menginap dapat memanfaatkan bahan lokal ataupun merehab sebagian dari ruangan dengan tanpa membangun baru dari bahan yang mencerminkan ciri kekotaan.

Terakhir untuk produk wisata adalah aksesibilitas, berupa sarana-prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat berkunjung di sebuah destinasi (objek). Dalam konteks ini, sarana dan prasarana dibangun agar

wisatawan dapat mencapai objek dengan aman, nyaman, dan layak. Inilah yang membedakan dengan domain ekonomi yang menyediakan sarana dan prasarana agar produk yang dijual dapat didistribusi sehingga dapat dijangkau konsumen. Sementara domain pariwisata sarana dan prasarana dibangun agar konsumen dapat mengunjungi objek wisata sehingga mereka dapat "membeli" produk tersebut. Dengan demikian aksesibilitas menyebabkan wisatawan mencapai objek wisata dengan mudah, aman, dan nyaman/layak.

Dari ketiga aspek produk wisata di atas, model pengembangan produk haruslah mempertahankan keasliannya agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, masing-masing objek harus memiliki *style* tersendiri yang berbeda dengan objek wisata lainnya. *Style* merupakan faktor penting dalam menentukan penjualan. Dalam pariwisata yang dikatakan sebagai *product style* yang baik adalah daya tarik objek itu sendiri, memiliki perbedaan dengan objek lainnya, dukungan kondisi prasarana yang terpelihara dengan baik, ketersediaan fasilitas "*something to see, something to do, & something to buy*", dan dilengkapi dengan sarana prasarana lainnya.

Keberhasilan pengembangan kawasan desa wisata pada sebuah lokasi, selain keberadaan atraksi wisata sebagai produk yang menjadi faktor penarik (*pull factors*) konsumen untuk mendatangi objek tersebut, juga tidak kalah pentingnya adalah peran dan keberadaan elemen kelembagaan dan sumber daya manusia di dalamnya. Kelembagaan yang terbentuk hendak-

nya memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.

2.6.3 Prasyarat dan Prinsip Desa Wisata

Destinasi pariwisata merupakan unsur penting dalam pengembangan kepariwisataan yang berperan penting sebagai penentu dan penggerak utama keputusan wisatawan untuk berwisata. Destinasi pariwisata merupakan rangkaian komponen produk pariwisata yang berada dalam satu satuan spasial/wilayah tertentu. Keseluruhannya membentuk karakter yang menjadi komponen penting dalam pengembangan suatu daerah wisata.

Pengembangan destinasi pariwisata seyogyanya mampu mengkomodir dan mengoptimalkan sumber daya budaya dan alam yang ada sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan wisatawan. Dalam konteks ini, destinasi pariwisata semestinya dikembangkan dengan cara-cara inovatif, kreatif, profesional, terpadu baik secara sektoral maupun kewilayahan, dan sistematis, sehingga menghasilkan sistem penyediaan jasa, infrastruktur dan layanan serta strategi pemasaran yang handal dan tepat (Pitana dan Diarta, 2009: 128).

Terkait dengan desa wisata, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan berkenaan dengan daya tarik sebagai suatu objek wisata. Aspek-aspek ini merupakan sisi-sisi dari suatu objek yang membuatnya dikatakan menarik dalam arti merupakan prasyarat dalam rangka keberhasilan penciptaan desa wisata (Ahimsa-Putra, 2000). Beberapa di antaranya adalah:

(1) Keunikan;

Suatu objek wisata biasanya menjadi menarik antara lain karena keunikannya, kekhasannya, keanehannya. Artinya objek ini sulit didapatkan kesamaannya atau tidak ada dalam masyarakat-masyarakat yang lain. Aspek keunikan ini seringkali terkait dengan sejarah dari objek itu sendiri, baik itu sejarah dalam arti yang sebenarnya maupun sejarah dalam arti yang lebih mitologis. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi objek-objek wisata, aspek keunikan ini perlu diperhatikan, karena ini dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan.

(2) Estetika;

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aspek keindahan, dan ini merupakan unsur yang paling penting dari suatu objek wisata untuk dapat menarik wisatawan. Aspek keindahan ini sangat perlu diperhatikan dalam proses pengembangan suatu objek wisata. Suatu objek yang tidak unik dapat saja menarik banyak wisatawan karena keindahan yang dimilikinya. Bila mana keindahan ini menjadi sangat menonjol, maka keindahan tersebut kemudian menyatu dengan keunikan, dan membuat objek tersebut semakin menarik.

(3) Keagamaan;

Suatu objek wisata bisa saja tidak unik, tidak menarik, namun mempunyai nilai keagamaan yang tinggi. Artinya, objek tersebut dipercaya sebagai objek yang bersifat suci, wingit, atau mempunyai kekuatan supranatural tertentu, yang dapat

mempengaruhi kehidupan manusia. Aspek keagamaan ini perlu diperhatikan ketika identifikasi dan promosi dilakukan, karena wisatawan tertentu seringkali tertarik oleh hal-hal semacam ini.

(4) Ilmiah.

Suatu objek wisata juga dapat menarik banyak wisatawan karena nilai ilmiah atau nilai pengetahuan yang tinggi, yang dimilikinya, walaupun unsur unik, estetis, dan keagamaannya kurang. Namun demikian, nilai ilmiah yang tinggi dari objek wisata tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari keunikannya. Aspek ilmiah ini juga perlu diperhatikan dalam proses identifikasi, pengembangan, dan promosi objek wisata tersebut, karena ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Daya tarik sebuah objek wisata akan semakin kuat bilamana berbagai elemen penarik tersebut hadir bersamasama. Jika tidak, maka dalam proses pengembangan dan promosi elemen-elemen yang masih kurang menonjol hendaknya diperkuat lagi agar objek tersebut mampu menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Tindakan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan serta kondisi lingkungan perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah desa wisata, khususnya di wilayah yang masih memiliki ikatan serta sifat tradisional. Sebagai model dasar pembentukan sebuah desa wisata, harus memperhatikan pemilihan *site* dalam merencanakan fasilitas yang hendak digunakan. Perlu koordinasi dengan penduduk serta

kerjasama antara mereka sendiri untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan serta pemasaran yang efektif. Prinsip penting lainnya dalam pengembangan desa wisata adalah menomorsatukan proses pelibatan penduduk setempat dalam tukar gagasan, tindakan, pengambilan keputusan, dan kontrol dalam mengembangkan kegiatan pariwisata pedesaan. Dengan demikian diharapkan dari kegiatan yang lahir nantinya dapat memberikan kerangka kerja yang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara masyarakat dan wisatawan.

Strategi melibatkan peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan: (1) Menginformasikan kepada penduduk setempat tentang apa yang akan terjadi bila pariwisata pedesaan masuk ke desa mereka; (2) Menjaga dialog dengan dan di antara mereka; (3) Menghargai pendapat dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan; (4) Meningkatkan pemahaman akan hakekat pariwisata dan dampaknya; (5) Mendorong hubungan antar wisatawan dan penduduk setempat; (6) Melindungi masyarakat lokal dari melimpahnya kegiatan pariwisata (Ahimsa-Putra, dkk, 2000: 16).

Prinsip penting lainnya yang patut diperhatikan dalam pengembangan desa wisata; (1) Mengembangkan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanannya yang dekat atau di dalam desa itu sendiri, (2) Fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk, secara individu atau bekerjasama, (3) Pengembangan yang didasarkan kepada sifat budaya tradisional suatu

desa (*human life*) atau sifat atraksi yang dekat dengan alam (*nature based*).

Untuk itu pada beberapa wilayah pedesaan yang telah menjadi bagian dari kegiatan wisata desa perlu diupayakan peningkatan aspek yang telah disebutkan di atas, yakni aspek fisik, sosial dan budaya, serta kelembagaannya agar dapat menjadi desa-desa wisata (Ahimsa-Putra, dkk.2000: 17).

2.6.4 Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata (UNDP and WTO. 2003. *Tourism Development Plan for Nusa Tenggara*, Indonesia. Madrid: World Tourism Organization. Hal. 69) yaitu:

1) Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata

- Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos, dan sebagainya.

- Interaksi setengah langsung
Bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.
- Interaksi Langsung
Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam di akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan, yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua.
- d. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan merupakan aspek penting mengingat adanya peraturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Yang perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
- e. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap.

2) Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

- Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu:
- a. Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
 - b. Jarak Tempuh, adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
 - c. Besaran Desa, menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
 - a. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut.
 - b. Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut

sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata.

- c. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil.

Menurut Ahimsa-Putra, dkk.(2000: 19), prinsip dasar dari pengembangan desa wisata berdasarkan pendekatan fisik ini adalah :

- 1) Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
- 2) Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.

Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

III. ANALISIS SETTING PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Letak geografis Kabupaten Bantul berada pada 7° 44' 50" - 8° 37' 40" Lintang Selatan dan 110° 18' 40" - 110° 34' 40" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Bantul adalah Kota Bantul

yang berada sekitar 10 km dari kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 508,85 kilometer persegi (50.685 Ha) atau 15,90 persen dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi dalam 17 kecamatan, 75 desa/kelurahan, 933 pedukuhan, dan 5.681 RT.

Secara administratif wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran rendah di bagian tengah, daerah perbukitan di bagian timur dan barat, serta daerah pantai di bagian selatan. Kondisi bentang alam tersebut membujur dari arah utara ke selatan, dengan topografi berupa dataran rendah 40 persen dan 60 persen lainnya merupakan daerah perbukitan yang kurang subur.

Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul antara tahun 1990-2000 relatif tinggi, mencapai 1,1%, kedua tertinggi setelah Kabupaten Sleman. Pertumbuhan penduduk tertinggi terutama terdapat di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta yang termasuk dalam kawasan APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), yakni kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Kepadatan penduduk pada ketiga kecamatan tersebut di atas juga paling tinggi, dengan Kecamatan Banguntapan sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat (30,6 Jiwa/Ha). Sementara kecamatan-kecamatan lain yang masuk kawasan APY masih mempunyai kepadatan penduduk relatif rendah, terutama pada kawasan yang dalam konteks APY berfungsi sebagai daerah penyangga.

Sebagai bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Bantul memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata yang tersebar di beberapa kecamatan. Keberadaan obyek dan daya tarik tersebut mampu mendukung citra pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bersaing dengan Propinsi Bali.

3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kebon Agung termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Imogiri. Kecamatan Imogiri terletak di antara 3'33'10" BT sampai dengan 3'38'12" BT dan di antara 7'54'14" LS sampai dengan 7'55'5" LS. Lokasi penelitian secara administratif terletak dalam Kecamatan Imogiri, salah satu dari kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul dengan luas 5.448,69 ha, 22 % Luas Kabupaten Bantul. Secara administratif wilayahnya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pleret.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dlingo.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pondong.

Kecamatan Imogiri merupakan wilayah yang terletak di bagian timur Kabupaten Bantul Propinsi DIY dan dapat dicapai dari beberapa arah, antara lain dari Kecamatan Jetis dan Kecamatan Dlingo yang dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri dengan luas 5.448,69 ha, terdiri dari 8 (delapan) desa.

Secara fisiografis, tanah di Kecamatan Imogiri merupakan dataran dan perbukitan. Sebagian besar dataran terletak di wilayah Kecamatan Imogiri bagian barat, dan yang berbentuk perbukitan berada di wilayah Kecamatan Imogiri bagian timur. Perbukitan tersebut di antaranya merupakan bagian dari Pegunungan Seribu.

Wilayah Kecamatan Imogiri terletak pada ketinggian 7 m - 500 m di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 7 m - 25 m meliputi luasan 791 Ha dan ketinggian 25 m - 100 m meliputi luasan 2.718 Ha. Dari sisi iklim, tidak terdapat perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan wilayah lain di kabupaten Bantul sisi selatan. Musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan rata-rata 2.300 mm - 2.400 mm per tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober dengan suhu rata-rata 22^o C - 28^o C.

Ada tiga sungai yang membelah kecamatan ini, yaitu: Sungai Opak,

Sungai Oyo, dan Sungai Celeng yang mengalir dari utara menuju muara di laut selatan. Salah satu sungai tersebut yaitu Sungai Opak yang berada di sisi paling barat di Desa Kebon Agung dibendung untuk fungsi pengairan pertanian.

Wilayah Kecamatan Imogiri dengan luas 5.448,69 ha terbagi dalam pemanfaatan lahan berupa sawah, pekarangan, ladang, hutan, dan lainnya.

Berdasarkan luas kecamatan Imogiri menurut penggunaan lahan ternyata 2.84.022 ha merupakan tanah kering, 20.0000 ha merupakan tanah basah 305.8605 ha merupakan tanah hutan, 752.0000 ha merupakan tanah perkebunan yang digunakan untuk pemukiman, fasilitas umum berjumlah 9.6525 ha, sawah berjumlah 15.349.486 ha, dan lainnya antara lain berupa makam, kolam berjumlah 1.2031 ha.

Penduduk Kecamatan Imogiri terdiri dari 58.955 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) desa yang terdiri dari 28.818 jiwa laki-laki dan 30.137 jiwa perempuan atau 16.683 KK. Sedangkan dilihat dari sisi usia penduduk di Kecamatan Imogiri, dengan total jumlah penduduk 58.955 orang, jumlah tertinggi pada usia 25-55 tahun, dengan jumlah 24.368 orang (41,33 %).

Sesuai dengan penggunaan lahan Kecamatan Imogiri yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, maka kondisi itu tidak jauh beda dengan perekonomian yang juga digerakkan oleh sektor pertanian di mana 64 % dari jumlah angkatan kerja bekerja sebagai petani penggarap lahan milik sendiri maupun yang bekerja sebagai buruh

yang menggarap lahan pertanian dan peternak. Lahan pertanian sebagian besar berupa ladang di lahan kering dan penanaman padi sawah hanya dilakukan sekali dalam setahun karena terdapatnya musim kemarau rata-rata terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Pada musim hujan, lahan ditanami padi. Pada musim kemarau, lahan ditanami dengan palawija seperti ubi-ubian dan kacang-kacangan. Di samping bertani, masyarakat petani juga beternak sapi, kambing/domba, maupun unggas sebagai mata pencaharian.

Secara administratif, kawasan Desa Kebon Agung terletak di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Kebon Agung sebagian besar berupa dataran dan sebagian dari bagian utara merupakan wilayah persawahan yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Talun.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Tengah.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sriharjo.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sanden.

Desa Kebon Agung merupakan salah satu dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Imogiri dan memiliki 5 lingkungan dusun.

Penduduk Desa Kebon Agung terdiri dari 3.340 jiwa yang tersebar di 5 (lima) dusun, yang terdiri dari 1.638 jiwa laki-laki dan 1.702 jiwa perempuan atau 1.324 KK. Sehingga kepadatan penduduknya 17,34 jiwa per hektar.

3.3 Analisis Social Setting

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul. Kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir, stagnasi pengembangan obyek wisata alam, serta perubahan pola minat wisatawan di era global membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul menjadi ikut menurun. Mengantisipasi hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sejak tahun 2007 telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata perdesaan (desa wisata) sebagai daerah tujuan wisata alternatif baru dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bantul melalui pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung dalam bentuk pembuatan Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW). Desa ini dipilih karena memiliki sumber daya untuk dapat dikembangkan menjadi desa wisata sebagai salah satu alternatif destinasi wisata di tengah kejenuhan pasar wisata alam di Kabupaten Bantul. Kegiatan pariwisata yang dapat diandalkan di Desa Kebon Agung adalah keanekaragaman obyek wisata, kerajinan, budaya, dan tradisi serta pendidikan.

Sejalan dengan perubahan *trend* pariwisata yang terus berubah menuju wisata alternatif di masa datang serta prioritas kebijakan kepariwisataan nasional saat ini yaitu optimalisasi

program pengembangan pariwisata perdesaan melalui pembentukan dan pengembangan desa wisata dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, seharusnya pengembangan pariwisata perdesaan melalui pengembangan desa wisata menjadi peluang dan aspek penting guna meningkatkan pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri, yang telah dilaksanakan selama ini.

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, pemecahan masalah yang akan diteliti, dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dengan nara sumber dan dokumentasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan sehingga permasalahan pada implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung didapatkan solusinya. Sedangkan mengenai penelitian deskriptif, Faisal (2005, h.94), mengemukakan bahwa dalam penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

4.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung:
 - a. Zona Kawasan (Tata Ruang)
 - b. Lingkungan
 - c. Sarana Prasarana (Fasilitas Wisata)
 - d. Produk Wisata (Sumber Daya Alam, Minat Khusus dan Budaya)
 - e. SDM
 - f. Kelembagaan
2. Faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung dan penghambat dalam implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Institusi perencanaan
 - 2) Respon Masyarakat
 - 3) Ketersediaan SDM
 - 4) Kerjasama Pihak Yang Terkait
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Ketersediaan dana
 - 2) Ruang dan Waktu
 - 3) Legalisasi kebijakan
 - 4) Komitmen Pengambil Kebijakan

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

4.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat peneliti untuk memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti sesuai dengan situs yang ada, maka lokasi yang peneliti ambil ini bertempat di Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu :

1. Peranan sektor pariwisata yang cukup strategis yakni sebagai sektor andalan dalam peningkatan akselerasi perekonomian masyarakat dan kontribusi terhadap PAD
2. Potensi pariwisata perdesaan dalam bentuk desa wisata di Kabupaten Bantul relatif besar tetapi belum dikembangkan secara optimal.
Di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keterbatasan geografis, dan praktis seperti: waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2008: 128).

4.3.2 Situs Penelitian

Situs di sini merupakan suatu tempat yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Situs yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terutama pada Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, Bidang Dinas Pemasaran Wisata dan Sub Bagian Program, Kantor Kecamatan Imogiri, Kantor Desa Kebon Agung, Kelompok Sadar Wisata Kebon Agung, serta Dinas/Instansi yang terkait dalam implementasi perencanaan pengembangan pariwisata di Desa Kebon Agung.

4.4 Sumber dan Jenis Data

4.4.1 Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait fokus penelitian, maka informan ditentukan secara

purposive pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan *snow ball*.

Key Informan adalah Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yang dipilih secara *purposive* karena dinilai mengetahui, menguasai, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan informasi *key informan*, akan dikembangkan infoman berikutnya secara *snow ball* dari Pejabat Kecamatan di Kecamatan Imogiri, Kepala Desa yang masuk dalam pengembangan kawasan tersebut yaitu Kepala Desa Kebon Agung, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Masyarakat Desa Kebon Agung.

- b. Dokumen, sebagai sumber data penting sebagai bahan tambahan untuk menunjang dan menguatkan penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari obyek penelitian melalui teknik dokumenter, seperti: peraturan, kebijakan, data statistik, buku-buku laporan, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari suatu tempat atau area di mana peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan situs dan fokus penelitian yaitu lokasi obyek dan daya tarik wisata, baik yang sudah ada maupun yang potensial di Kabupaten Bantul.

4.4.2 Jenis Data

Data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau nara sumber sebagai informan dan responden terpilih yang diwawancarai dan diobservasi secara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

1. Data RIPPD, RPJMD, RDKP, dan RTOW Desa Kebon Agung
2. Hasil monitoring
3. Identifikasi kondisi
4. Identifikasi unsur-unsur pengaruh keberhasilan/ ketidakberhasilan implementasi
5. Ruang lingkup geografis

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Bantul, BAPPEDA Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, dan beberapa instansi lainnya, serta buku atau publikasi dan literatur-literatur yang menunjang penelitian ini.

4.5 Proses Pengumpulan Data

Terdapat tiga tahapan dalam proses pengumpulan data. Pertama, *getting in* atau persiapan memasuki kancah penelitian; kedua, *getting along* yaitu ketika berada di lokasi penelitian; dan ketiga, *logging data* ketika saat pengumpulan data.

4.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (2007 h. 20) dengan prosedur yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pada proses dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat tentatif sehingga memerlukan proses yang interaktif dan bersifat terus-menerus.

4.7 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, pada penelitian ini mengacu pada empat kriteria yang dikemukakan Moleong (2004, h.324), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul secara umum tidak terlepas dari 2 komponen penting konsep perencanaan pariwisata pada skala makro yaitu Kebijakan Pengembangan Pariwisata Propinsi DIY dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul. Pada kedua konsep tersebut penekanan pengembangan pariwisata di masa datang diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui bentuk pengembangan pariwisata minat khusus dalam bentuk kegiatan pertanian, kerajinan, dan budaya.

Hal tersebut diatas, selanjutnya juga dikuatkan dengan menempatkan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2006-2010 melalui pengembangan destinasi-destinasi wisata unggulan yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Konsep perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung dalam bentuk Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW) Desa Kebon Agung merupakan salah satu upaya dalam pengembangan pariwisata mengacu konsep perencanaan sebagaimana dimaksud di atas. Konsep RTOW Desa Kebon Agung pada prinsipnya memberikan arahan rencana pengembangan pariwisata di Desa Kebon berdasarkan 2 kategori yakni berdasarkan skenario dan arahan. Rencana pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Agung secara skenario meliputi:

- a. Skenario Fungsi dan Visi Kawasan, berkaitan dengan peruntukan lahan, penataan fungsi dan aktivitas, vegetasi dan ruang terbuka, serta mitigasi untuk mengurangi ancaman dan resiko bencana
- b. Skenario Fisik, berkaitan dengan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, penataan infrastruktur, obyek dan daya tarik wisata, dan usaha pariwisata
- c. Skenario Non Fisik, berkaitan dengan konsep perencanaan pengembangan kepariwisataan, rencana pengembangan potensi pariwisata, rencana pengelolaan SDM, rencana pengelolaan kelem-

bagaan, dan rencana pengelolaan investasi.

Sedangkan rencana pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung secara arahan umum meliputi: pengembangan ODTW, pengembangan akomodasi wisata, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, pengembangan lingkungan wisata, dan pengembangan ekonomi.

Implikasi selanjutnya dari RTOW Desa Kebon Agung tersebut adalah sejauhmana rencana tersebut dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam konteks kebijakan perencanaan, perencanaan bukanlah merupakan suatu kegiatan penyusunan dokumen rencana saja, melainkan dalam pengertian yang luas yaitu perencanaan yang meliputi proses kegiatan yang menyeluruh dan terus menerus dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Proses perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan untuk merealisasikannya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana tersebut bersifat realistis dan dapat

menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasinya, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.

Bila dikaitkan dengan konsep perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung melalui RTOW Desa Kebon Agung, maka dapat dikemukakan bahwa RTOW tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan yang berperan sebagai alat bagi implementasinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Melalui implementasi akan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam proses pencapaian tujuan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung.

Implementasi dari perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung dapat dikatakan bersifat *non-self-executing*, dalam arti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak (*stakeholder*) supaya tujuan pembuatan kebijakan tersebut tercapai. Beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung adalah Lembaga Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Propinsi DIY, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata), Masyarakat Lokal (secara individu maupun kelompok kelembagaan), dan Swasta (LSM, ASITA dan PHRI).

Implementasi dari perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung dijelaskan sebagai berikut:

A. Zona Kawasan (Tata Ruang)

Komposisi peruntukan lahan masih didominasi oleh sawah dan ladang sebesar 62,85% dan pemukiman sebesar 26,84%. Kawasan ini memiliki 4 fungsi makro utama yaitu: pertanian, pendidikan, pariwisata, dan pemukiman. Untuk fungsi pariwisata sebagai zona komersial belum berkembang dengan pesat dalam arti ketersediaan usaha-usaha pariwisata masih minim dan pemanfaatan potensi tepian air belum optimal. Dari aspek vegetasi dan ruang terbuka hijau sangat mendukung citra kawasan dalam pengembangan pariwisata, di samping sebagai area resapan air dan pengendalian iklim makro, juga didukung dengan vegetasi tanaman perindang yang baik. Sedangkan untuk mitigasi bencana, sudah tersedia lahan terbuka hijau, namun masih terdapat pemukiman pada area rawan bencana khususnya di sepanjang daerah tepi bendungan.

B. Lingkungan

Pengembangan lingkungan menunjukkan kondisi lingkungan Desa Kebon Agung masih alami dan asri. Selain belum banyak aktivitas industri, parameter kuantitas dan kualitas air sebagai daya dukung ekologis lingkungan menunjukkan hasil yang baik. Selain itu, konsep pengembangan pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan membuat eksistensi kondisi kawasan tetap baik.

C. Sarana dan Prasarana (Fasilitas Wisata)

Kajian terhadap aksesibilitas yang menunjukkan kemudahan wisata-

wan menuju Desa Kebon Agung dari pusat Kota Yogyakarta sudah didukung dengan kondisi jalan yang baik. Sedangkan kondisi jalan atau sirkulasi jalan di sekitar kawasan secara umum juga sudah mendukung untuk aktivitas pariwisata. Keterbatasan terlihat pada ketersediaan terminal/parkir bis yang baru sebatas lahan kosong tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Dari aspek jaringan drainase, listrik, dan komunikasi menunjukkan kondisi yang memadai. Dari aspek usaha wisata, sudah tersedia akomodasi dalam bentuk *homestay*, yakni rumah tinggal penduduk yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menginap dan beraktivitas dengan penduduk. Penduduk setempat juga berhasil mengembangkan usaha pariwisata lain dalam bentuk penyewaan sepeda, perahu dayung, peralatan pertanian, kerajinan, dan pengelolaan parkir. Dari aspek sarana pariwisata, ketersediaan sarana (fasilitas wisata) di kawasan ini masih sangat minim. Yang tersedia baru sebatas rumah dayung, tempat pemanjangan, rumah makan, dan toilet umum. Sedangkan terminal bus wisatawan, kios souvenir, arena dan taman bermain belum tersedia. Selain itu, sarana pendukung informasi dalam bentuk baliho dan peta informasi kawasan juga sangat minim.

D. Produk Wisata

Desa Kebon Agung memiliki produk wisata berbasis perdesaan dalam bentuk keanekaragaman obyek wisata meliputi: wisata alam,

budaya, tradisi, dan minat khusus. Masyarakat setempat telah berhasil melakukan diversifikasi wisata dari semula hanya sebatas wisata alam di Bendung Tegal, telah berkembang menjadi wisata perdesaan pendidikan pertanian, kerajinan, dan wisata budaya. Dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai obyek dan subyek dari pariwisata itu sendiri. Sehingga dari kajian aspek produk ini, Desa Kebon Agung dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria sebagai Desa Wisata dan sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata perdesaan ke depan.

E. SDM

Kondisi SDM masyarakat Desa Kebon Agung secara umum dilihat dari latar belakang pendidikan sebagian besar atau 27% berpendidikan sarjana sehingga menjadi aset potensial dalam pengelolaan pariwisata. Kemudian dikaji dari kondisi SDM yang terkait dengan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan yang diwakili oleh Pokdarwis Kebon Agung menunjukkan 40% berpendidikan sarjana. Pelatihan-pelatihan bidang pariwisata juga sering dilakukan oleh Lembaga Pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bantul, Dinas Pariwisata DIY, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehingga sangat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM pariwisata di Desa Kebon Agung.

F. Kelembagaan

Secara umum kondisi organisasi kelembagaan di Desa Kebon Agung sudah berjalan baik yang ditunjukkan dengan eksistensi dan

keterpaduan dari beberapa kelompok atau lembaga pendukung aktivitas pariwisata di Desa Kebon Agung. Lembaga yang langsung menangani pengelolaan pariwisata Desa Kebon Agung adalah Pokdarwis Kebon Agung bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain terkait sesuai pilihan paket wisata yang diinginkan oleh wisatawan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan ketugasan Pokdarwis yang masih terpusat pada internal pengelolaan dan pelayanan kepada wisatawan. Ketugasan eksternal dalam bentuk promosi wisata, komunikasi dengan stakeholder pariwisata, dan kerjasama penawaran paket dengan obyek wisata lain masih sangat kurang.

Kajian terhadap faktor yang berperan dalam mendukung implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung meliputi: Institusi Perencana dalam hal ini Bappeda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pengembangan pariwisata perdesaan dalam skala kebijakan. Respon masyarakat terhadap implementasi pengembangan pariwisata di Desa Kebon Agung sangat positif yang ditunjukkan dalam bentuk upaya diversifikasi wisata, swadaya pembangunan fasilitas, dan interaksi dengan wisatawan melalui penyediaan *homestay*. Ketersediaan SDM juga sangat mendukung di Desa Kebon Agung yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan masyarakat dan Pokdarwis yang memadai. Kerjasama Pihak yang Terkait juga mendukung dalam pengembangan pariwisata di

Desa Kebon Agung baik dari Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam bentuk pelatihan SDM, promosi wisata, penyelenggaraan event/atraksi wisata, pembangunan fisik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari faktor yang berperan sebagai penghambat, ketersediaan dana merupakan faktor penghambat utama karena sebagian besar implementasi dari perencanaan tersebut terkait dengan penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan fasilitas wisata yang memerlukan dana cukup besar. Dari aspek ruang dan waktu memberikan hambatan dalam menentukan skala prioritas terkait dengan wilayah Desa Kebon Agung yang cukup luas. Paradigma optimis dalam penentuan jangka waktu ikut menentukan ketidakefektifan implementasi rencana di lapangan. Legalisasi kebijakan yang tidak konsisten membuat implementasi RTOW tidak berjalan lancar. Hal ini juga ditambah dengan rendahnya komitmen pengambil kebijakan pada level kepala daerah sehingga dukungan terhadap implementasi RTOW itu menjadi rendah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang tersaji dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sektor pariwisata sebagai salah satu andalan di Kabupaten Bantul, dalam konsep perencanaan pengembangannya secara makro sudah sesuai dengan konsep perencanaan pengembangan pariwisata dalam

skala regional dan nasional. Hal ini tercermin dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam RIPPD Kabupaten Bantul dan RPJMD 2006-2010 yang menekankan perencanaan pengembangan pariwisata berbasis perdesaan dengan mengutamakan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Bantul.

2. Salah satu konsep perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul secara mikro adalah RTOW Desa Kebon Agung. Konsep perencanaan ini merupakan wujud dari implementasi perencanaan pembangunan pariwisata daerah dalam upaya mengembangkan daerah/kawasan tujuan wisata baru atau alternatif di Kabupaten Bantul dan sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan *trend* pariwisata secara global yang lebih menekankan pengembangan pariwisata pada aspek keramahan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan budaya lokal.
3. Perencanaan pengembangan pariwisata Desa Kebon Agung secara prinsip mengacu pada RTOW Desa Kebon Agung. Pendekatan dan arahan pengembangan pariwisata pada konsep tersebut menekankan pada optimalisasi keberadaan keanekaragaman potensi obyek wisata melalui penyediaan sarana dan fasilitas pendukung wisata, pemberdayaan lembaga, dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata Desa Kebon Agung.

4. Implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung belum berjalan secara optimal. Mengacu pada konsep rencana pengembangan pariwisata perdesaan berdasarkan RTOW Desa Kebon Agung berdasarkan skenario arahan pengembangan, terlihat bahwa dari skenario fungsi dan visi kawasan kondisi terpenuhi dalam arti sudah mendukung untuk pengembangan kawasan pariwisata. Dari skenario fisik menunjukkan realisasi rencana pengembangan yang rendah dalam arti banyak kebutuhan fisik khususnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas wisata yang belum terwujud. Pada aspek ini kontribusi masyarakat melalui penyediaan rumah tinggal sebagai *homestay* sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan sangat mendukung sehingga pengembangan pariwisata dapat tetap berjalan. Kemudian konsep pengembangan dari aspek skenario non fisik menunjukkan realitas hasil yang sangat mendukung pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung. Hal ini ditandai dengan upaya-upaya pengelolaan potensi pariwisata melalui diversifikasi produk wisata dalam bentuk agrowisata, ekowisata dan wisata budaya, pengembangan SDM, dan kelembagaan yang berjalan baik. Namun perkembangan implementasi yang positif pada aspek fungsi dan visi kawasan serta aspek non fisik belum diimbangi dengan perkembangan aspek fisik yang rendah sehingga membuat perkembangan pariwisata kawasan Desa Kebon Agung secara menyeluruh menjadi belum optimal.
5. Daya dukung pariwisata Desa Kebon Agung sudah baik ditinjau dari aspek zona kawasan, lingkungan perdesaan, keanekaragaman dan keunikan produk wisata sesuai dengan konsep desa wisata, kecukupan SDM, dan keterlibatan aktif kelembagaan yang ada, meskipun masih terdapat permasalahan pada belum optimalnya zona komersial dan keterbatasan upaya-upaya promosi dari Lembaga Pokdarwis selaku pengelola Desa Wisata Kebon Agung. Daya dukung pariwisata Desa Kebon Agung masih relatif rendah dilihat dari aspek pengelolaan dan ketersediaan sarana dan fasilitas wisata yang memadai khususnya pada fasilitas-fasilitas umum bagi wisatawan. Hal ini secara keseluruhan memberikan pengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan bagi wisatawan yang tidak berjalan dengan optimal.
6. Faktor-faktor yang berperan dalam mendukung implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Kebon Agung meliputi Institusi Perencana, Respon Masyarakat, Ketersediaan SDM, dan Kerjasama Pihak Terkait. Namun dari aspek dukungan kerjasama pihak terkait kontribusi dan kerjasama dari pihak swasta belum terwujud, khususnya pada upaya pengembangan kawasan Desa Kebon Agung di zona komersial dan keterlibatan dalam *sponsorship* pembangunan sarana dan prasarana fasilitas wisata.

7. Faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat dalam implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung meliputi: Ketersediaan Dana yang tidak mendukung, serta Ruang dan Waktu yang berpola optimistik. Aspek ketersediaan dana merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap implementasi perkembangan pariwisata di Desa Kebon Agung, dikarenakan sebagian besar konsep perencanaan tersebut berorientasi pada pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas wisata yang membutuhkan dana cukup besar.
 8. Keberlangsungan dari implementasi perencanaan pengembangan pariwisata perdesaan di Desa Kebon Agung yang diwujudkan dalam bentuk RTOW Desa Kebon Agung harus tetap dilanjutkan mengacu pada tujuan dan makna penting dari pengembangan pariwisata perdesaan ini yang berorientasi pada peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat, dan sejalan dengan arah dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah dan nasional saat ini.
- sebagai apresiasi terhadap kesiapan dan daya dukung masyarakat Desa Kebon Agung yang tinggi dan positif untuk memajukan pariwisata Desa Kebon Agung.
2. Melakukan ekstensifikasi pemasaran wisata melalui pengembangan paket wisata bekerjasama dengan obyek wisata lain dalam lingkup Kecamatan Imogiri sehingga ketersediaan produk wisata menjadi lebih menarik dan pilihan wisata yang beraneka ragam sehingga membuka peluang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
 3. Intensifikasi komunikasi dan hubungan dengan *stakeholder* khususnya pihak swasta untuk membuka peluang dalam mengembangkan zona komersial di kawasan Desa Kebon Agung yang belum tergarap secara maksimal melalui penerapan pola kerjasama-kerjasama operasional dan bisnis di zona komersial tersebut.
 4. Peningkatan aspek promosi oleh Pokdarwis Desa Kebon Agung khususnya diarahkan pada pasar wisata pelajar dan mahasiswa sebagai pasar potensial dalam pengembangan pariwisata perdesaan melalui intensifikasi penawaran kerjasama-kerjasama kunjungan wisata dari sekolah dan perguruan tinggi.
 5. Evaluasi terhadap RTOW Desa Kebon Agung perlu dilakukan khususnya pada aspek *special planning* kawasan dan jangka waktu pelaksanaan, dengan menggunakan skala prioritas dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan secara arif dan bijaksana berdasarkan

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Desa Kebon Agung dalam bentuk pembangunan sarana dan fasilitas wisata di kawasan tersebut. Kebijakan ini

perspektif kepentingan masyarakat dan wisatawan.

6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan khususnya pada akhir tahun ke 5 untuk mengetahui tingkat perkembangan keberhasilan dari imple-

mentasi RTOW Desa Kebon Agung tersebut sehingga dapat menjadi pedoman percontohan bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baru lainnya di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- _____. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pembaruan
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri; Ari Sujito, Wiwied Trisnadi., 2000., *Pengembangan Model Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan*. Puspar-UGM.Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Anderson, Leiper, N. 1979. *The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and Tourism Industry*. Annals of Tourism Research. 6.
- Arsyad, Lincloin, 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta
- Bappenas, 2004. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Damanik, Janianton & Weber, Helmut F., 2006. *Perencanaan Eko Wisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pariwisata, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Pengumpulan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Burhan Bungin (ed). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Goeldner, Charles R., 2000. *Tourism, Principles, Philoshopies, Eight Edition*, New York : John Willey and Son.
- Gunawan, Myra, P. Dan Ina Herlina, 2000. *Garis Besar Perencanaan Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Di Tingkat Lokal dan Wilayah*. Pusat Penelitian Kepariwisataaan Institut Teknologi Bandung.
- Gunn, C. A dan Var, T. 2002. *Tourism Planning*, 4th Edition. New York, Routledge.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning as Integrated and Sustainable Approach*. Van Nostrand Reinhold. USA.
- Islamy, M. Irfan, 2003. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya
- , 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Edisi Revisi Bandung: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kayat, Kalsoom. 2006. Stakeholders Perspectives Toward a Community-Based Rural Tourism Development. *Journal of Travel Research*. Vol. 4, No. 87
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ketut, I. Sedana. 2009. *Perencanaan Pengembangan Agrowisata di Kec Payangan, Kabupaten Gianyar*. Tesis. Universitas Brawijaya. Malang
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kuncoro. Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- . 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kompas, 26 Nopember 2009
- Lesego. Sebele. 2009. Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana. *Journal Tourism Management*. Vol. 12, No. 3, pp 1-11.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1995. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Nugroho, Ryan D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia

- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Prasojo, Eko, dkk. 2007. *Materi Pokok Pemerintahan Daerah*, Modul 1-9. Universitas Terbuka. Jakarta
- Puy, Betty. 2007. *Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Base G*. Tesis. UGM
- Reid, Laurel and Stephen Smith. 1997. *Keys to Successful Tourism Planning: Lessons from Niagra (a Video)*. Brock University, St. Catharines.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeprapto, Riyadi. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Siagian, Sondang P. 1984. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Spillane, JJ. 2000. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius
- Soebagyo, G. 1991. *Dasar-dasar Pariwisata*, edisi pertama, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soenarko, SD. 2002. *Public Policy, pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Airlangga University Press: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Suwantoro, G. 2001. *Dasar-dasar Pariwisata, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, CV Bandung: Mandar Maju.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Masagung Jakarta.
- . 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Todaro, Michael P. 2004. *Economic Development*. New York: Longman Publishing.
- Torres, Rebecca. 2003. *Linkages Between Tourism and Agriculture in Mexico: Journal Pergamon (Annual of Tourism Research), Vol. 30, No. 3, pp 546-566.*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan. Dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- . 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Wahyudi. 2006. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wallace, Gillian. 2008. Eco-Cultural Tourism As A Means For The Sustainable Development of Culturally Marginal And Environmentally Sensitive Regions. *Journal of Travel Research*. Vol. 47 No. 235
- Weaver, David dan Martin Opperman. 2000. *Tourism Management*. Brisbane, Australia: John Willey and Son.
- Weimer, D.L and A.R Vining. 1999. *Policy Analysis: Concepts and Practice (3rd Edition)*, Upper Sadle River. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Wiranto, Tatag. 2006. Perencanaan Dalam Era Desentralisasi. *Mimeo*, makalah Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
- World Tourism Organization. *WTO News 2000*, Issue 2. Madrid, 2000.
- World Tourism Organization. *Development of Community-Based Tourism (Indonesia)*. Tidak diterbitkan, Madrid, 2003.
- Yoeti, Oka.(ed). 2001. *Ilmu Pariwisata Sejarah Perkembangan dan Prospeknya*. Jakarta: PT. Pertja
- (ed). 2008. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Prandya Paramita